BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan secara komprehensif terhadap rumusan masalah, kerangka teoritis, data empiris dari wawancara, serta hasil evaluasi penerapan SMK, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai *Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi* (SMKK) telah dituangkan secara normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan teknis dari amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengaturan ini secara eksplisit mewajibkan penyedia jasa untuk menyusun dan menerapkan dokumen keselamatan konstruksi dalam setiap tahapan proyek. Namun, berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara sistematis, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, kapasitas pelaksana, dan konsistensi pengawasan agar asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap keselamatan kerja dapat diwujudkan secara nyata.
2. Tingkat kepatuhan penyedia jasa konstruksi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar menunjukkan adanya variasi implementasi. Pada salah satu proyek yang dikerjakan oleh penyedia jasa swasta, pelaksanaan SMK masih didominasi oleh pendekatan administratif semata, tanpa diikuti

penerapan substantif yang konsisten di lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa norma hukum telah dikenal, tetapi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan. Sebaliknya, proyek yang dilaksanakan oleh penyedia jasa badan usaha milik negara menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap penerapan SMKK, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun implementasi teknis di lokasi proyek. Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, penerapannya belum merata di antara pelaku jasa konstruksi. Di samping itu, terbatasnya kewenangan BJKW VI Makassar yang hanya bersifat pembinaan administratif tanpa otoritas penegakan sanksi secara langsung turut menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera. Kondisi ini menegaskan bahwa asas efektivitas hukum dan asas akuntabilitas administratif dalam pengawasan SMKK masih perlu diperkuat, agar norma keselamatan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial dalam praktik.

3. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar dalam pengawasan penerapan SMKK bersifat teknis dan evaluatif, dilaksanakan berdasarkan mandat struktural dari Kementerian PUPR melalui penugasan tahunan. Fungsi pengawasan dijalankan melalui pendekatan administratif, berupa evaluasi dokumen, observasi lapangan, dan kegiatan pembinaan. Namun, keterbatasan dalam aspek kewenangan, sumber daya, serta cakupan proyek menyebabkan pengawasan belum sepenuhnya menyentuh implementasi substantif di lapangan. Hal ini berdampak pada efektivitas kontrol terhadap pelaksanaan norma keselamatan konstruksi, yang masih belum optimal dalam mendorong kepatuhan menyeluruh oleh penyedia jasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan terhadap kepatuhan penyedia jasa dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, penulis memberikan beberapa saran strategis dan normatif sebagai berikut:

1. Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), disarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 guna memperjelas standar minimum substansi pelaksanaan SMKK di lapangan. Penguatan regulasi ini perlu mencakup:
 - a. Standar teknis pelaksanaan dokumen keselamatan (RKK, AKK, IBPRP, dll.);
 - b. Penegasan tahapan verifikasi dan validasi dokumen oleh konsultan pengawas dan pengguna jasa;
 - c. Integrasi sanksi administratif dan rekomendasi blacklist dalam mekanisme pengadaan barang/jasa.

Saran ini sejalan dengan prinsip legal enforceability dalam hukum administrasi, yakni bahwa setiap norma hukum harus dirancang agar dapat ditegakkan secara efektif di tingkat operasional.

2. Diperlukan intervensi sistemik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan substantif penyedia jasa, bukan sekadar administratif. Hal ini dapat ditempuh melalui:
 - a. Wajibnya pelatihan bagi tenaga teknis penyedia jasa sebelum penandatanganan kontrak;
 - b. Penetapan SMKK sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja penyedia jasa pasca proyek;

- c. Pengembangan instrumen monitoring digital untuk memantau pelaksanaan keselamatan secara real time.

Langkah ini bertujuan agar penyedia jasa tidak hanya menjalankan kewajiban hukum karena tekanan formal (compliance by coercion), melainkan karena adanya kesadaran hukum (compliance by awareness), sebagaimana ditegaskan dalam teori kepatuhan oleh Tom Tyler.

3. Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar perlu diperkuat tidak hanya dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, tetapi juga dalam aspek kewenangan pengawasan. Untuk itu, saran yang dapat diberikan meliputi:

- a. Mendorong perubahan regulasi agar BJKW memiliki kewenangan yang lebih operasional dalam menilai dan menindak pelanggaran SMKK;
- b. Membentuk unit kerja khusus pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi yang bersifat lintas wilayah;
- c. Membangun sistem kolaboratif antara BJKW, Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten, Pengguna Jasa, dan Penyedia Jasa guna menjamin kesinambungan fungsi pengawasan.

Penguatan fungsi pengawasan ini menjadi sangat penting agar prinsip checks and balances dalam hukum administrasi dapat diwujudkan secara nyata, serta sejalan dengan amanat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.